



BUPATI BANGKA BARAT

PERATURAN BUPATI BANGKA BARAT

NOMOR 47 TAHUN 2016

TENTANG

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT
TAHUN 2016-2021**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGKA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa salah satu upaya untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja Pemerintah Kabupaten Bangka Barat adalah dengan ditetapkannya indikator kinerja utama sebagai dasar pengukuran keberhasilan pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Bangka Barat tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 217, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4033);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat, dan Kabupaten Belitung Timur di Propinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5675);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian, dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
8. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 9 tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 2 tahun 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2015 Nomor 2 Seri E);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Bangka Barat Nomor 07 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun Anggaran 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016 Nomor 3 Seri E).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021.**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Bupati adalah Bupati Bangka Barat.
2. Daerah adalah Kabupaten Bangka Barat.
3. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Indikator Kinerja Utama adalah ukuran keberhasilan organisasi dalam mencapai tujuan dan merupakan ikhtisar hasil berbagai program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi organisasi.
5. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan.
6. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Bangka Barat.

BAB II

TUJUAN DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Tujuan Penetapan Indikator Kinerja Utama adalah :

- a. untuk memperoleh informasi kinerja yang penting dan diperlukan dalam menyelenggarakan manajemen kinerja secara baik; dan

- b. untuk memperoleh ukuran keberhasilan dari pencapaian suatu tujuan dan sasaran strategis organisasi yang digunakan untuk perbaikan kinerja dan peningkatan akuntabilitas kinerja.

Pasal 3

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 4

Indikator Kinerja Utama Pemerintah Daerah digunakan oleh pemerintah daerah dan organisasi perangkat daerah untuk :

- a. perencanaan jangka menengah;
- b. perencanaan tahunan;
- c. penyusunan dokumen perjanjian kinerja;
- d. penyusunan laporan akuntabilitas kinerja; dan
- e. evaluasi kinerja instansi pemerintah.

BAB III

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

Pembinaan dan Pengawasan atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini dilakukan oleh Inspektorat.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bangka Barat.

Ditetapkan di Muntok
pada tanggal November 2016

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI

Diundangkan di Muntok
pada tanggal November 2016

**Plt. SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANGKA BARAT,**

H. M. EFFENDI

Lampiran : Peraturan Bupati Bangka Barat tentang
 Indikator Kinerja Utama Pemerintah
 Kabupaten Bangka Barat Tahun 2016-2021
 Nomor : Tahun 2016
 Tanggal : November 2016

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
 PEMERINTAH KABUPATEN BANGKA BARAT TAHUN 2016-2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Transparan	Opini BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Kesimpulan hasil evaluasi BPK terhadap Laporan Keuangan Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah	Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
2.	Meningkatnya Kemandirian Pemerintah Daerah	Derajat Otonomi Fiskal Daerah (DOFD)	PAD [dibagi] Total Pendapatan [dikali] 100	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah	Badan Pengelolaan Pajak dan Retribusi Daerah
3.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Akuntabel	Nilai SAKIP Daerah	Nilai hasil evaluasi atas Laporan Kinerja Instansi Pemda oleh pihak Kemenpan RB/ instansi lain yang berwenang.	Badan Perencanaan Pembangunan dan Litbang	Kemenpan RB, Inspektorat Provinsi, BPKP
4.	Terwujudnya Birokrasi Pemerintah Daerah yang Efektif	Indeks Profesionalitas ASN	Penjumlahan antara gap kompetensi pejabat dengan jabatan yang disyaratkan ditambah dengan kinerja pejabat yang bersangkutan ditambah dengan kompetensi dikurangi pelanggaran disiplin	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah	Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Daerah
5.	Terpenuhinya Pelayanan Dasar Masyarakat dan Kualitas Pelayanan Publik	Persentase Pemenuhan SPM Pelayanan Dasar	SPM Pelayanan Dasar yang Terpenuhi [dibagi] nilai SPM yang seharusnya dilaksanakan [dikali] 100	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Sat Pol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan,	Dinas Sosial, Pemberdayaan Masyarakat dan Desa, Dindikpora, Dinkes, Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Sat Pol PP, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan,
		Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) atas pelayanan publik	Jumlah nilai SKM seluruh SKPD [dibagi] jumlah SKPD [dikali] 100	Sekretariat Daerah	Sekretariat Daerah
6.	Meningkatnya kesejahteraan petani tanaman pangan	Rata-rata pendapatan bersih petani per bulan	Rata-rata pendapatan bersih petani perbulan (dalam juta)	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
7.	Meningkatnya nilai produksi, komoditas unggulan perkebunan rakyat	Nilai produksi komoditi unggulan perkebunan rakyat	Jumlah produksi komoditi unggulan perkebunan dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
8.	Meningkatnya nilai produksi perikanan	Nilai produksi perikanan tangkap	Jumlah produksi perikanan tangkap dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan budidaya air tawar	Jumlah produksi budidaya air tawar dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan
		Nilai produksi perikanan budidaya air laut	Jumlah produksi budidaya air laut dikalikan harga	Dinas Kelautan dan Perikanan	Dinas Kelautan dan Perikanan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
9.	Meningkatnya nilai produksi peternakan	Nilai produksi ternak ruminansia	Jumlah produksi daging ruminansi dikalikan harga	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Nilai produksi ternak unggas	Jumlah produksi daging unggas dikalikan harga	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
10.	Berkembangnya sistem agribisnis/ agroindustri	Persentase peningkatan jumlah usaha dalam rantai agribisnis (hulu hingga hilir)	Untuk setiap sub-sistem: jumlah unit usaha tahun ke-t dikurangi tahun ke t-1 [dibagi] jumlah unit usaha tahun ke t-1 [dikali] 100	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
		Persentase peningkatan nilai tambah komoditas pertanian dalam arti luas	nilai tambah komoditas pertanian tahun t dikurangi t-1 [dibagi] nilai tambah komoditas pertanian t-1 [dikali] 100	Dinas Pertanian dan Pangan	Dinas Pertanian dan Pangan
11.	Meningkatnya jumlah investasi/ penanaman modal di daerah	Peningkatan jumlah investasi dalam satu tahun (PMA dan PMDN)	Jumlah investasi tahun t dikurangi t-1	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans	Dinas PM, Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu, dan Nakertrans
12.	Berkembangnya jumlah unit dan kapasitas Umi, Industri kecil dan menengah yang mandiri	Persentase peningkatan Umi	Jumlah UMi tahun ini dikurangi jumlah UMi tahun sebelumnya [dibagi] jumlah Umi tahun awal [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Persentase peningkatan unit IKM	Jumlah industri kecil dan menengah tahun ini dikurangi jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dibagi] jumlah industri kecil dan menengah tahun sebelumnya [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Peningkatan skala usaha Umi	Jumlah UMI yang meningkat [dibagi] dengan jumlah UMI secara keseluruhan [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Kapasitas usaha IKM unggulan	Jumlah produksi industri kecil dan menengah unggulan per tahun menurut jenis produk (industri makanan olahan/ kuliner serta industri kerajinan)	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
13.	Berkembangnya ragam usaha dan produk Umi, Industri kecil dan menengah yang berdaya saing	Jumlah ragam usaha Umi	Jumlah ragam usaha dalam satu tahun	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Jumlah ragam usaha IKM	Jumlah ragam usaha industri kecil dan menengah dalam satu tahun	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Jangkauan pasar produk unggulan Umi	Jumlah UMI yg memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah UMi [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Jangkauan pasar produk unggulan IKM	Jumlah IKM Unggulan yang memiliki jangkauan pemasaran tertentu [dibagi] Jumlah IKM Unggulan [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
		Kontribusi Umi dan IKM terhadap PDRB	Nilai PDRB yang bersumber dari Umi, industri kecil dan menengah [dibagi] nilai PDRB [dikali] 100	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian	Dinas Koperasi, UKM, dan Perindustrian
14.	Berkembangnya destinasi wisata	Kunjungan Wisata	Jumlah kunjungan wisata setiap tahun	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
		kontribusi Sektor pariwisata terhadap PDRB	Jumlah kontribusi PDRB dari sektor pariwisata [dibagi] jumlah PDRB [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata	Kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n dikurangi kontribusi PAD sek. pariwisata tahun n-1 [dibagi] kontribusi sektor pariwisata pada tahun n-1 [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
15.	Terjaganya kelestarian warisan budaya sebagai aset wisata	Persentase benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata	Jumlah benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah yang dilestarikan yang terintegrasi dengan program pariwisata [dibagi] seluruh benda, situs, kawasan cagar budaya, seni dan kebudayaan daerah [dikali] 100	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan	Dinas Pariwisata dan Kebudayaan
16.	Meningkatnya konektivitas daerah	Indeks konektivitas kabupaten	jumlah jaringan jalan [dibagi] jumlah desa/kelurahan	Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan	Dinas PU dan Penataan Ruang, Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman dan Perhubungan
17.	Tersedianya air baku untuk usaha budidaya komoditas pertanian	Persentase luas areal pertanian yang beririgasi teknis	Luas areal yang memiliki jaringan irigasi teknis [dibagi] luas areal pertanian [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
18.	Meningkatnya kualitas pendidikan	Peringkat ujian Nasional se-provinsi Bangka Belitung	Posisi Bangka Barat menurut deret hitung dari peringkat kelulusan kabupaten/ kota di provinsi Bangka Belitung	Dindikpora	Dindikpora
		Angka Harapan Lama Sekolah	Lamanya sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu di masa mendatang	Dindikpora	BPS
		Angka rata rata lama sekolah Kabupaten	Kombinasi antara partisipasi sekolah, jenjang pendidikan yang sedang dijalani, kelas yang diduduki dan pendidikan yang ditamatkan	Dindikpora	BPS
19.	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan	Angka Harapan hidup	Rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh oleh seseorang sejak lahir	Dinkes	BPS
20.	Meningkatnya perlindungan terhadap perempuan dan anak	Persentase penurunan kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak	2 kali capaian dikurang baseline [dibagi] capaian [dikali] 100	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA	Dinas Pengendalian Penduduk dan KB, PP dan PA
21.	Meningkatnya minat dan wadah pengembangan olah raga	Prestasi olah raga pendidikan di tingkat Provinsi	Peringkat olah raga pelajar di tingkat Provinsi melalui popda dan kejurda	Dindikpora	Dindikpora
		Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi	Peringkat olahraga prestasi di tingkat provinsi dalam poprov	Dindikpora	Dindikpora
22.	Terwujudnya masyarakat dan pelaku usaha/kegiatan yang berbudaya/ berwawasan lingkungan	Persentase desa/kelurahan yang melakukan pengelolaan lingkungan hidup berbasis masyarakat desa/kelurahan	Jumlah desa & kelurahan yang melaksanakan pengelolaan lingkungan hidup [dibagi] jumlah seluruh desa & kelurahan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
		Jumlah organisasi masyarakat sipil (LSM), komunitas (Civil Society Organization/CSO) yang bergerak dibidang lingkungan hidup secara aktif	Jumlah LSM/CSO yang bergerak di bidang lingkungan hidup yang terdaftar/ berdomisili di Bangka Barat dan berperan aktif	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PENGHITUNGAN	SKPD PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
		Persentase usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan & pemantauan lingkungan secara baik	Jumlah usaha dan atau kegiatan yang melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dibagi] jumlah seluruh usaha dan atau kegiatan yang wajib melakukan pengelolaan dan pemantauan lingkungan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
23.	Meningkatnya pengelolaan sampah terpadu dan berkelanjutan	Persentase cakupan wilayah yang terlayani pengelolaan sampah secara terpadu	Jumlah desa/kelurahan mendapat layanan pengelolaan sampah [dibagi] jumlah seluruh desa/kelurahan kabupaten Bangka Barat [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
24.	Meningkatnya kualitas sanitasi lingkungan permukiman	Persentase penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak	Jumlah penduduk yang memiliki fasilitas sanitasi yang layak di suatu wilayah pada periode tertentu [dibagi] jumlah penduduk di wilayah dan dalam periode yang sama [dikali] 100	Dinas Kesehatan	Dinas Kesehatan
25.	Terkendalinya bencana banjir	Persentase desa/ kelurahan/titik banjir yang dimitigasi thd banjir/genangan air	Jumlah desa/kelurahan/titik banjir kumulatif yang dimitigasi thd banjir [dibagi] dengan jumlah /desa/kelurahan/titik banjir yang perlu dimitigasi thd banjir kondisi tahun awal (2015) [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
26.	Terwujudnya pemulihan lahan kritis	Persentase luas lahan kritis yang berhasil dipulihkan menjadi produktif	Luas lahan kritis (diluar kawasan hutan dan bukan lahan izin usaha perusahaan) yang dipulihkan menjadi produktif [dibagi] luas lahan kritis kondisi awal yang ditetapkan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
27.	Terwujudnya konservasi sumber air	Persentase sumber air yang telah di konservasi	Jumlah sumber air yang telah dikonservasi [dibagi] jumlah seluruh sumber [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup
28.	Menjaga dan meningkatkan perizinan pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Persentase pengajuan izin pemanfaatan ruang sesuai dengan produk hukum penataan ruang	Total jumlah izin yang dikeluarkan sesuai dengan produk hukum penataan ruang [dibagi] jumlah total pengajuan perizinan pemanfaatan ruang [dikali] 100	Dinas PU dan Penataan Ruang	Dinas PU dan Penataan Ruang
29.	Meningkatnya luasan kawasan ruang terbuka hijau di kawasan perkotaan	Persentase ruang terbuka hijau	Luas ruang terbuka hijau [dibagi] luas kawasan perkotaan [dikali] 100	Dinas Lingkungan Hidup	Dinas Lingkungan Hidup

BUPATI BANGKA BARAT,

H. PARHAN ALI